

PEMBINGKAIAN BERITA AKSI UNJUK RASA MENOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

(Analisis *Framing* Robert M. Entman Pada Media *Online* Liputan6.com dan Tirto.id Edisi 8–9 Oktober 2020)

Wahyu Widiyaningrum¹, M. Isnaini²

Universitas Budi Luhur¹, Universitas Bunda Mulia²

Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta, Indonesia¹

Jl. Ancol Barat IV, RT.12/RW.2, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, 14430. DKI Jakarta²

e-mail : wahyu.widiyaningrum@gmail.com¹, *e-mail* : emisnaini@gmail.com²

Abstract

Demonstration in a number of cities in Indonesia on October 5 to 8, 2020 as a form of rejection of the Ratification of the Omnibus Law (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) by the government were widely reported by the mass media, especially online media. Liputan6.com and Tirto.id as one of the online news site in Indonesia also reported demonstrations conducted to reject the ratification of the Omnibus Law Act. The purpose of this research is to analyze how far Liputan6.com and Tirto.id media seek to highlight issues through the coverage of demonstrations, and how each media constructs reality and frames protests against the Omnibus Law Act in its coverage. This research used Robert M. Entman's framing analysis to find out framing of protests against the Omnibus Law Act in Liputan6.com and Tirto.id. The results showed that Liputan6 tends to focus on the riots that occurred during the demonstrations and put aside the news about what the mass demands during demonstrations. Meanwhile Tirto.id to represent the reality of the protests against the Omnibus Law Act with more objective and balanced coverage..

Keywords: Demonstration, Omnibus Law, Robert M. Entman, Framing

Abstrak

Aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2020 sebagai wujud penolakan atas Pengesahan *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah ramai diberitakan oleh media massa terutama media *online*. Liputan6.com dan Tirto.id sebagai salah satu situs berita *online* di Indonesia juga memberitakan demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pengesahan UU *Omnibus Law*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh media Liputan6.com dan Tirto.id mengusahakan penonjolan isu-isu melalui pemberitaan demonstrasi, dan bagaimana masing-masing media mengkonstruksi realitas dan membingkai unjuk rasa menolak UU *Omnibus Law* dalam pemberitaannya. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert M. Entman untuk mengetahui pembingkaiian mengenai aksi unjuk rasa menolak Undang Undang *Omnibus Law* di Liputan6.com dan Tirto.id. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberitan Liputan6.com cenderung fokus pada kericuhan yang terjadi selama demonstrasi dan mengesampingkan pemberitaan mengenai apa yang menjadi tuntutan massa saat demonstrasi. Adapun Tirto.id berusaha untuk merepresentasikan realita mengenai unjuk rasa penolakan UU *Omnibus Law* dengan pemberitaan yang lebih objektif dan berimbang.

Kata kunci: Demonstrasi, Omnibus Law, Robert M. Entman, Framing

PENDAHULUAN

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), mahasiswa, serikat pekerja, buruh serta aktivis dari beberapa organisasi masyarakat menyelenggarakan unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia seperti Malang, Kendari, Yogyakarta, Medan, dan lainnya. pada 5-8 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa tersebut sebagai wujud penolakan atas Pengesahan *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada rapat paripurna hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Pengesahan Undang-Undang Ciptaker menimbulkan protes dari berbagai kalangan karena banyak pasal yang termuat di dalamnya dinilai bermasalah terutama pasal mengenai izin investasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Selain itu proses pembuatan, pengkajian dan pengesahan Undang-Undang Ciptaker juga menimbulkan suara miring dari beberapa kalangan karena dinilai tidak gamblang sekaligus cacat dalam formal pembentukannya (Idhom, 2020).

Kartika menyatakan bahwa *omnibus law* adalah metode penyusunan Undang-Undang yang bertujuan untuk mengganti dan menyesuaikan pengaturan secara bersamaan yang bersumber dari beragam Undang-Undang. Metode tersebut berlainan karena ruang lingkupnya melibatkan substansi muatan yang bermacam-macam dan pasal yang banyak, serta memiliki tingkat kerumitan tinggi. Metode *omnibus law* kemudian diterapkan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan membuat suatu gabungan perubahan yang berasal dari 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang menjadi satu Undang-Undang (Kartika, 2020, h. 3). Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disodorkan oleh Pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 12 Februari 2020 dan dipersiapkan menggunakan konsep *Omnibus law*, untuk dijadikan sebuah rancangan membangun perekonomian agar mampu mengundang pemodal sehingga dapat menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diinginkan mampu mewujudkan hukum yang sederhana, responsif, fleksibel, dan kompetitif demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana mandat Konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kontributif dengan menyelaraskan undang-undang melalui satu undang-undang dengan konsep *omnibus law*. Adanya RUU Cipta Kerja dipandang perlu oleh Pemerintah karena tingginya tingkat pengangguran di negara Indonesia (Mayasari, 2020, h. 1).

Penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh publik terutama oleh kalangan mahasiswa sedang ramai diberitakan oleh media massa terutama oleh media *online*. Menurut data analisis Drone Emprit, subyek atau aktor yang paling sering diberitakan dari

artikel berita online terkait aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah Mahasiswa, Massa, Polisi, Buruh, DPR dan Jokowi. Sedangkan aksi mahasiswa yang paling dominan diberitakan adalah berupa aksi unjuk rasa, orasi, *long march*, corat-coret, perlawanan, *blockade* jalan, pelemparan batu dan lain-lain (Fahmi, 2020).

Media massa, khususnya media *online*, menjadikan berita unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai topik yang paling sering diberitakan bahkan menjadi *headline* dalam pemberitaannya. Adanya berita *headline* (berita utama) mencerminkan perhatian media terhadap peristiwa tertentu. *Headline* dapat dilihat sebagai representasi dari media dalam memandang penting tidaknya suatu peristiwa (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2005). *Headline* yang muncul di media cetak seperti pada perkembangannya juga muncul di media *online*. Fungsi *headline* di media cetak maupun *online* relatif sama, yakni bertujuan menarik pembaca untuk membuka berita serta membaca berita tersebut. Lebih lengkapnya *headline* berfungsi sebagai berikut: Pertama, berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. *Headline* bertugas untuk memamerkan berita, bahkan menghiasi seluruh halaman surat kabar. Kedua, berfungsi sebagai identitas berita *Headline* adalah identitas dari masing-masing berita, *headline* menjadi sebagai pembeda dan pemisah antara berita yang satu dengan lainnya, karna pada hakikatnya, antara berita yang satu dengan yang lain berbeda. Ketiga, *Headline* sebagai pencerminan isi berita. Kepala berita atau *headline* adalah pencerminan isi. *Headline* adalah intisari atau bagian terpenting dari berita. Mengintisari sebuah berita berarti sekaligus merepresentasikan isi berita (Widodo, 1997).

Liputan6.com dan Tirto.id sebagai salah satu situs berita *online* di Indonesia juga memberitakan demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Headline* mengenai aksi unjuk rasa dilakukan oleh Liputan6.com melalui pemberitaan mereka pada 9 Oktober 2020 sedangkan Tirto.id menerbitkan artikel berita mendalam dengan mengangkat isu tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020. Liputan6.com dan Tirto.id seperti halnya media *online* lainnya, mempunyai perspektif dalam mengkonstruksikan peristiwa demonstrasi terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Keputusan Liputan6.com dan Tirto.id menjadikan peristiwa unjuk rasa dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam pemberitaan mereka menjadi kajian menarik untuk diteliti karena melibatkan bagaimana peristiwa tersebut dipahami oleh media yang berbeda. Pemberitaan dari kedua media akan dianalisis menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui konstruksi masing-masing media online dalam memberitakan aksi unjuk rasa menolak Undang-

Undang Cipta Kerja. Robert M. Entman mendefinisikan analisis *framing* sebagai sebuah proses pemilahan dari beragam aspek realitas yang ada sehingga elemen tertentu dari sebuah peristiwa menjadi lebih mencolok dibandingkan aspek yang lainnya. Entman juga melibatkan peletakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih dominan daripada sisi lainnya (Eriyanto, 2012).

Penelitian menggunakan analisis *framing* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Gisella Fathin Umari dan Hadi Purnama pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Kasus *Hoax* Ambulans Pemprov DKI dan PMI Dalam Bingkai Media Online.” Penelitian tersebut menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman yang menganalisa pemberitaan terkait ambulans milik Pemprov DKI dan PMI yang mengantarkan bensin dan batu saat aksi unjuk rasa tanggal 26 September 2019 di media Kompas.com dan Detik.com. Hasil penelitian membuktikan bahwa media Detik.com memiliki sudut pandang yang objektif dalam pemberitaan sedangkan media Kompas.com mempunyai sudut pandang yang subjektif.

Penelitian selanjutnya adalah Pembingkai Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh Hayyitita Nastatih dan Laksmi Rachmaria pada tahun 2019. Penelitian ini juga memanfaatkan *framing* dari Robert M. Entman dengan tujuan mengetahui pembingkai media online Tribunnews.com mengenai Demonstrasi Mahasiswa di Gedung DPR. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Tribunnews.com menampilkan isu unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPR kedalam ranah politik, membingkai mahasiswa sebagai pembuat onar, Polisi sebagai sosok pahlawan, dan masyarakat sebagai korban dari demonstrasi.

Analisis *framing* juga dipilih oleh peneliti untuk menganalisis pembingkai pemberitaan di media *online* Liputan6.com dengan Tirto.id, bagaimana media tersebut mengkonstruksi realitas dan membingkai peristiwa unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam pemberitaannya dari berbagai aspek yang ada. *Framing* juga dapat menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh masing-masing media.

Dengan demikian peneliti mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Pembingkai Berita Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis *Framing* Robert M. Entman Pada Media *Online* Liputan6.com dan Tirto.id Edisi 8–9 Oktober 2020).” Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis seberapa jauh media Liputan6.com dan Tirto.id mengusahakan penonjolan isu-isu melalui pemberitaan demonstrasi,

dan bagaimana masing-masing media mengkonstruksi realitas dan membingkai unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam pemberitaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme. Eriyanto mengungkapkan, menurut pandangan konstruksionis media bukanlah saluran yang bebas, ia adalah subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan bias, pandangan, dan pemihaknya (Eriyanto, 2012, h. 26). Paradigma ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui realitas atau konstruksi seperti apa yang coba dibangun oleh media *online* Liputan6.com dan Tirto.id mengenai Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi serta memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang bersumber dari masalah sosial (Creswell, 2016).

Metode pada penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert M. Entman. Framing dapat dimaknai sebagai pemberian makna, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2012, h. 221). Penulis akan melakukan analisis berita dengan menggunakan elemen *framing* Entman yakni; pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan sumber masalah atau masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) setelah sebelumnya melakukan seleksi isu.

Subjek dalam penelitian ini adalah portal berita *online* Liputan6.com dan Tirto.id, adapun objek penelitiannya yaitu artikel-artikel berita *online* terkait “Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020.” Periode waktu ini dipilih penulis karena merupakan puncak unjuk rasa dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di tahun 2020. Dari total 109 artikel berita yang diterbitkan oleh Liputan6.com, peneliti memilih 7 artikel berita untuk dianalisis dan dari total 68 artikel berita yang dimuat Tirto.id, peneliti memilih 8 artikel yang akan dianalisis dengan elemen *framing* Robert M. Entman karena berita tersebut memiliki penonjolan aspek terbanyak. Pengumpulan data dilakukan dari dua sumber yakni; data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari artikel berita mengenai pemberitaan tentang “Aksi Unjuk Rasa Menolak Undnag-Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020” pada portal berita *online* Liputan6.com dan Tirto.id dan data sekunder berasal dari literatur berupa referensi

jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta artikel terkait lainnya guna melengkapi penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan artikel berita dari Liputan6.com dan Tirto.id mengenai “Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang–Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020,” kemudian peneliti menganalisis aspek atau penggunaan kata yang ditonjolkan dari pemberitaan tersebut dengan menggunakan keempat analisis *framing* Robert M. Entman setelahnya hasil analisis data yang didapatkan akan peneliti jabarkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Media Liputan6.com

Berdasarkan analisis seleksi isu yang dilakukan, dari 109 berita terkait “Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang–Undang Cipta Kerja” di Liputan6.com edisi 8–9 Oktober 2020 yang menggunakan kata kunci pencarian atau *hashtag* *demo omnibus law*, terdapat 6 berita menonjolkan isu moral, 3 berita menonjolkan isu penularan Covid 19, 1 berita terkait proses pengesahan UU Cipta Kerja, 3 berita terkait jalannya unjuk rasa yang kondusif, 37 berita menonjolkan isu mengenai kinerja polisi dan pemerintah dalam penanganan unjuk rasa, 22 berita menonjolkan opini akademisi atau tokoh politik dan yang terakhir terdapat 37 berita menonjolkan kericuhan atau anarkisme peserta demo. Dari keseluruhan pemberitaan terkait aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang di produksi, Liputan6.com lebih mengarahkan dan menonjolkan pemberitaannya ke isu terkait anarkisme peserta demo terutama mahasiswa, kinerja aparat polisi dan pemerintah serta opini tokoh politik terkait demo yang berlangsung.

Setelah melakukan pemilahan berita, peneliti kemudian memilih 7 berita terkait berita aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan dianalisis menggunakan analisis *framing* Robert M. Entman. Berita yang dipilih adalah berita yang memiliki penonjolan isu yang paling banyak dan memenuhi unsur pembingkai empat elemen Robert M. Entman yakni *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Cause* (Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral) dan *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah).

Tabel 1
Objek Teks Berita Liputan6.com Yang Dianalisis

No	Judul Berita	Waktu
1	Headline: Demo Tolak RUU Cipta Kerja Berujung Anarkistis, Sikap Pemerintah?	9 Oktober 2020
2	Kemendikbud: Mestinya Dalam Dulu Isi UU Cipta Kerja, Jangan Asal Turun ke Jalan	9 Oktober 2020
3	Wamenag: Demo Boleh, Tapi Tidak Dibenarkan Anarkis	9 Oktober 2020
4	Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pelaku Aksi Kekerasan Saat Demo UU Cipta Kerja	9 Oktober 2020
5	Dugaan Aksi Perampasan dan Penghapusan <i>File</i> Jurnalis	8 Oktober 2020
6	Tanggapi Demo Tolak RUU Cipta Kerja, Mahfud Md Sebut Ada Banyak Hoaks	8 Oktober 2020
7	Potret Demo UU Cipta Kerja di Grahadi, Mobil Polisi hingga Gerbang Rusak	8 Oktober 2020

Berdasarkan perangkat framing Robert N. Entman maka hasil pembedaan keseluruhan berita adalah sebagai berikut:

Define Problems

Pendefinisian masalah merupakan elemen utama *framing* yang menekankan bagaimana isu dimaknai oleh media. Pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada portal berita *online* Liputan6.com dapat dikategorikan dalam ranah “politik.” Demonstran khususnya mahasiswa dan buruh melakukan penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dimana proses pembuatannya dianggap terburu-buru, tidak transparan, pembahasan pasalnya menabrak ketentuan lain bahkan dengan adanya Undang-Undang ini memuat terlalu banyak pendelegasian pengaturan lanjutan kepada Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Selain itu dalam pemberitaan pada Liputan6.com ini banyak memuat pernyataan dari tokoh politik seperti Presiden Jokowi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Menko Polhukam Mahfud Md, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahril Adian, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi, Analis intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta, PC PMII Sleman Sidik Nur Toha dan lainnya.

Diagnose Causes

Elemen ini bertujuan untuk melihat cara media dalam membingkai siapa yang menjadi aktor dalam sebuah peristiwa. Pada pemberitaan Liputan 6, berita bohong atau *hoaks* dan

demonstran terutama mahasiswa serta kelompok buruh, anarko diidentifikasi sebagai “penyebab masalah”. Hal tersebut terlihat dalam artikel pemberitaan di Liputan6.com yang banyak memaparkan aksi demonstrasi sebagai aksi yang terjadi karena berita *hoaks*, berlangsung anarkis, dan ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu (anarko). Media melalui pemberitaannya mengesampingkan tuntutan utama massa saat demonstrasi yaitu proses pengesahan UU Cipta Kerja yang pembahasannya dinilai tidak transparan sekaligus cacat dalam formal penyusunannya. Berita pada Liputan6.com juga tidak secara jelas memaparkan kronologis dan detail keributan mahasiswa dengan aparat keamanan, karena bagaimanapun kericuhan bisa saja terjadi jika aparat keamanan dinilai tidak mendukung massa karena aksi-aksinya terus dihalangi dan diawasi.

Selanjutnya masyarakat pada berita diposisikan sebagai “korban dari demonstrasi” karena masyarakat dirugikan atas perusakan fasilitas umum, terganggunya akses transportasi atas penutupan jalan, dan ketakutan atas aksi anarkis yang dilakukan demonstran. Adapun aparat kepolisian diposisikan media sebagai “pahlawan” karena berperan sebagai pihak yang dapat melakukan kontrol situasi atas kerusuhan yang dilakukan demonstran dengan cara menembakan gas air mata. Bahkan berita Liputan6.com terkait dugaan penganiayaan aparat kepolisian terhadap jurnalis, pihak yang dianggap sebagai penyebab masalah adalah “jurnalis” yang tidak menggunakan atributnya secara lengkap sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang menyebabkan penganiayaan.

Make Moral Judgement

Perangkat *framing* ini dipergunakan untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Berdasarkan perangkat analisis *make moral judgement* (membuat keputusan moral), Liputan6.com banyak menekankan aksi unjuk rasa yang berakhir dengan perusakan fasilitas umum, keadaan yang tidak kondusif atau kerusuhan. Berita juga mengungkapkan aksi unjuk rasa diprovokasi oleh *hoaks* dan ditunggangi oleh kelompok penyusup atau kelompok kepentingan yang masuk di barisan demonstran (anarko) yang memiliki tujuan tertentu dan pada akhirnya melakukan provokasi serta menyebabkan keadaan anarkis, berlangsung tidak humanis, sehingga aparat kepolisian harus melakukan tindakan tegas dalam pengamanan demo. Selain itu dipaparkan juga bahwa keberadaan UU *Omnibus Law* tidak bertujuan untuk menyengsarakan rakyat dan proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi publik.

Treatment Recommendation

Elemen ini dipergunakan untuk menilai jalan apa yang dikehendaki oleh wartawan untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan perangkat *treatment recommendation* (penekanan penyelesaian), Liputan6.com banyak memaparkan perkembangan peristiwa dari kacamata berbagai tokoh politik seperti Menko Polhukam Mahfud Md, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi, Analis intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta, dan PC PMII Sleman Sidik Nur Toha, serta lebih banyak menghimbau agar khalayak mengawal perkembangan isu UU Cipta Kerja dengan aksi yang humanis dan tidak anarkis, tidak termakan *hoaks* atau *fake news*, bijak memilah dan memahami informasi serta yang lebih utama adalah mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 2 *Frame* Liputan.6.com
Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja
edisi 8–9 Oktober 2020

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah Politik
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	“Mahasiswa, Buruh, Hoaks dan Kelompok penyusup yang masuk di barisan demonstran (anarko)” sebagai pembuat onar atau penyebab masalah, “Masyarakat” sebagai korban dari aksi unjuk rasa dan “Polisi” sebagai sosok Pahlawan.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Aksi unjuk rasa diprovokasi oleh hoaks dan ditunggangi oleh kelompok penyusup atau kelompok kepentingan yang masuk di barisan demonstran (anarko) yang memiliki tujuan tertentu dan pada akhirnya melakukan provokasi serta menyebabkan keadaan anarkis, tidak humanis, sehingga aparat kepolisian harus melakukan tindakan tegas dalam pengamanan demo.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menghimbau agar khalayak mengawal perkembangan isu UU Cipta Kerja dengan aksi yang humanis dan tidak anarkis, tidak termakan <i>hoaks</i> atau <i>fake news</i> , bijak memilah dan memahami informasi dan yang lebih utama adalah dengan <i>judicial review</i> atau mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Media Liputan6.com mempunyai cara berbeda dalam melakukan penekanan aspek pada berita karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa realitas yang ditampilkan media

bukanlah sebuah cermin melainkan produk konstruksi dari pembuat berita. Dari 7 artikel berita tentang Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang–Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020, peneliti menemukan penonjolan aspek baik dalam bentuk kata-kata maupun gambar. Gambar atau foto pada berita banyak menggunakan gambar demonstrasi yang berubah ricuh atau fasilitas umum yang dirusak oleh massa sedangkan penonjolan aspek berupa kalimat adalah penggunaan kalimat pembentuk opini publik bahwa demonstran terutama mahasiswa dan buruh berperan sebagai “penyebab masalah”. Kata-kata yang sering muncul adalah tidak tertib, brutal, amuk massa, kerusuhan, kericuhan, bentrok, anarkis, tidak kondusif, beringas dan demonstrasi yang dilakukan sudah tidak terkendali. Liputan6.com melalui pemberitaannya lebih berfokus pada sisi pemerintah, hal tersebut terlihat dari tokoh dan kutipan dalam pemberitaan yang banyak berfokus pada opini pejabat, tokoh politik, dan pemerintah namun sedikit menampilkan opini dari sisi yang berlawanan. Pemberitaannya pun cenderung fokus pada kericuhan yang terjadi dan mengesampingkan pemberitaan mengenai apa yang menjadi tuntutan utama massa saat demonstrasi.

Hasil Penelitian Media Tirto.id

Berlandaskan analisis seleksi isu yang dilakukan, dari 68 berita terkait “Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang–Undang Cipta Kerja” di Tirto.id edisi 8–9 Oktober 2020 yang menggunakan kata kunci pencarian atau *hashtag* demo *omnibus law*, terdapat 14 berita menonjolkan isu kontra mengenai UU Cipta Kerja, 3 berita menonjolkan isu Covid 19, 3 berita mengenai dampak positif UU Cipta Kerja, 1 berita terkait pemblokiran jaringan komunikasi, 4 berita terkait *tips* dan informasi mengenai demo, 10 berita mengenai kinerja aparat polisi dalam penangkapan tersangka dan antisipasi demo yang dilakukan pemerintah, 7 berita menonjolkan isu dampak demo, 6 berita menonjolkan dukungan atas penolakan UU Cipta Kerja, 8 berita yang menonjolkan kericuhan demo, 1 berita mengenai arahan judicial review, 4 berita mengenai kunjungan Presiden Jokowi soal *food estate*, 6 berita yang menonjolkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa kekerasan saat demo, serta 1 berita mengenai kronologis detail atas tuntutan demonstran mengenai Undang-Undang Cipta kerja.

Dari keseluruhan pemberitaan terkait aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang di produksi, Tirto.id lebih mengarahkan dan menonjolkan pemberitaannya ke isu terkait kontroversi pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja serta demo yang berlangsung ricuh.

Dari 68 artikel berita, peneliti kemudian memilih 8 berita terkait berita aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan dianalisis menggunakan 4 perangkat analisis *framing* Robert M. Entman. Berita yang terpilih adalah berita yang memberikan penonjolan isu paling banyak dan memenuhi unsur pembingkai empat elemen *framing* Robert M. Entman.

Tabel 3
Objek Tirto.id Yang Dianalisis

No	Judul Berita	Waktu
1	Rakyat Indonesia Tolak <i>Omnibus Law</i> : 6 Pemda & 15 DPRD Surati Jokowi	9 Oktober 2020
2	Ada 52 Aduan Orang Hilang Usai Demo Tolak <i>Omnibus Law</i> di Yogyakarta	9 Oktober 2020
3	Ketimbang Berdemo, Polri Imbau Penolak UU Ciptaker Gugat ke MK	8 Oktober 2020
4	Sebut Ada Dalang di Balik Demo, Airlangga Diminta Buka Ruang Dialog	8 Oktober 2020
5	Demo Tolak UU Ciptaker, Polri Mengerahkan 2.500 Brimob Nusantara	8 Oktober 2020
6	Apa Penyebab Demo Mahasiswa dan Buruh pada 8 Oktober 2020?	8 Oktober 2020
7	Koalisi Sipil Kecam Represi Polisi ke Penolak <i>Omnibus</i> di Bandung	8 Oktober 2020
8	Baleg DPR Klaim Tak Wajib Publikasi Draf <i>Omnibus Law</i> UU Cipta Kerja	8 Oktober 2020

Berdasarkan empat elemen *framing* Robert N. Entman maka hasil pembingkai keseluruhan berita di Tirto.id adalah sebagai berikut:

Define Problems

Perangkat ini menunjukkan bagaimana isu dimaknai oleh media. Pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada portal berita online Tirto.id dapat dikategorikan dalam ranah “politik”. Penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi akibat proses pembuatannya yang dianggap tidak transparan karena terdapat perbedaan halaman dalam *draf* setelah pengesahan. *Draf* UU Cipta Kerja awalnya setebal 1.028 halaman saat diserahkan kepada DPR pada 12 Februari 2020, namun setelah disahkan pada 5 Oktober, terdapat bermacam-macam versi yang beredar ke publik. Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai terburu-buru dan pembahasannya dirahasiakan untuk publik. Pokok persoalan berasal dari terdapatnya pasal-pasal bermasalah pada *draf* *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja mencakup ruang lingkup pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup hingga pers.

Selain itu dalam pemberitaan pada Tirto.id banyak memuat pernyataan dari tokoh politik seperti Presiden Jokowi, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian, Pakar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lain sebagainya.

Diagnose Causes

Perangkat ini bertujuan untuk melihat cara media membingkai siapa aktor dalam suatu peristiwa. Dalam pemberitaan Tirto.id, pemerintah dan aparat kepolisian diposisikan sebagai “penyebab masalah”. Hal tersebut terlihat dalam artikel pemberitaan di Tirto.id yang banyak memberitakan terkait aparat polisi yang melakukan tindakan represi kepada demonstran, penggunaan kekerasan secara berlebihan, *sweeping* untuk menghalangi kebebasan berpendapat, intimidasi, dan melakukan pemeriksaan terhadap demonstran tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Selain itu pemberitaan juga berfokus pada tuntutan demonstran akan penyusunan UU Cipta Kerja yang bermasalah.

Selanjutnya demonstran khususnya mahasiswa dan buruh serta masyarakat pada berita diposisikan sebagai “korban dari demonstrasi”. Pemberitaan banyak mengutip pendapat dari pakar bahwa demonstrasi adalah salah satu sarana penyampaian aspirasi publik. Selanjutnya meskipun Tirto.id juga memberitakan mengenai kerusuhan yang terjadi pada demo, berita secara jelas memaparkan kronologis terjadinya bentrokan antara massa dengan aparat keamanan yang terjadi berbalasan serta dipaparkan juga alasan utama yang menjadi tuntutan demonstran pada unjuk rasa tersebut.

Make Moral Judgement

Perangkat ini dipergunakan untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Berdasarkan perangkat analisis *make moral judgement* (membuat keputusan moral), Tirto.id melalui kutipan pada beritanya banyak menekankan bahwa demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah yang mana demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang dan

bukanlah sesuatu yang negatif. Selain itu pemberitaan unjuk rasa oleh Tirto.id juga mengambil sudut pandang pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Treatment Recommendation

Perangkat ini bertujuan untuk menilai jalan keluar apa yang dikehendaki oleh wartawan untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan perangkat *treatment recommendation* (penekanan penyelesaian), Tirto.id tidak hanya memaparkan perkembangan peristiwa dari kacamata pemerintah maupun tokoh politik saja melainkan dari suara berbagai kalangan seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Dosen hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar, Ketua YLBHI Asfinawati, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian, Pakar hukum tata negara Feri Amsari serta melalui kutipan tokoh yang diwawancari, Tirto.id menyarankan pemerintah untuk melakukan transparansi, mengikutsertakan keterlibatan publik dan menyuarakan pencabutan *omnibus law* terutama pasal-pasal bermasalah. Penulis kemudian mengutip pendapat dari Ketua YLBHI Asfinawati, bahwa usulan *judicial review* dinilai tidak efektif mengingat *omnibus law* tidak layak digugat dengan cara konstitusional karena proses pembuatan hingga pengesahan melanggar konstitusi.

Tabel 4
Frame Tirto.id Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang–Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020

<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah Politik
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	“Pemerintah dan aparat kepolisian” sebagai penyebab masalah, “Masyarakat, demonstran terutama Mahasiswa dan Buruh” sebagai korban dari aksi unjuk rasa.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Demonstrasi merupakan bentuk pengungkapan aspirasi khalayak yang harus didengarkan oleh penguasa dan menjadi salah satu media khalayak untuk menyuarakan pendapatnya ke pemerintah.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menyarankan transparansi, keterlibatan publik dan menyuarakan pencabutan <i>omnibus law</i> terutama pasal-pasal bermasalah.

Dari delapan artikel berita Tirto.id tentang “Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang–Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020,” peneliti menemukan penonjolan aspek baik dalam bentuk kata-kata maupun gambar. Gambar atau foto pada artikel berita tidak banyak menggunakan gambar demonstrasi yang ricuh, sedangkan pada berita yang membahas mengenai UU Cipta

Kerja yang bermasalah banyak digunakan gambar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Puan Maharani selaku Ketua DPR pada saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen.

Selanjutnya penonjolan aspek berupa kalimat adalah penggunaan kalimat pembentuk opini publik bahwa pemerintah dan polisi sebagai “penyebab masalah”. Kata-kata yang muncul adalah represi, kekerasan, dan penyerangan. Media Tirto.id berusaha untuk merepresentasikan realita mengenai unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dengan pemberitaan yang lebih objektif dan berimbang. Tirto.id tidak hanya menampilkan opini dari sisi pemerintah namun juga dari berbagai kalangan. Pemberitaan mengenai kerusuhan yang terjadi tidak mengabaikan alasan utama demonstrasi dilakukan dan memuat kronologis peristiwa demonstrasi yang gamblang.

PENUTUP

Dari analisis yang dilakukan peneliti tentang pembingkai Liputan6.com dan Tirto.id mengenai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020 pada Liputan6.com dan Tirto.id sama-sama mendefinisikan permasalahan ke dalam ranah politik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kutipan opini dan wawancara dari pejabat pemerintah serta tokoh-tokoh politik pada artikel beritanya.
2. Liputan6.com membingkai “Mahasiswa, Buruh, *Hoaks* dan Kelompok penyusup yang masuk di barisan demonstran (anarko)” sebagai penyebab masalah, “Masyarakat” sebagai korban dari aksi unjuk rasa dan “Polisi” sebagai sosok Pahlawan. Sedangkan Tirto.id memposisikan “Pemerintah dan aparat kepolisian” sebagai penyebab masalah, “Masyarakat, demonstran terutama Mahasiswa dan Buruh” sebagai korban dari aksi unjuk rasa.
3. Pesan moral yang disampaikan Liputan6.com adalah aksi unjuk rasa diprovokasi oleh *hoaks* dan ditunggangi oleh kelompok penyusup atau kelompok kepentingan yang masuk di barisan demonstran (anarko) yang memiliki tujuan tertentu dan pada akhirnya melakukan provokasi serta menyebabkan keadaan anarkis, tidak humanis, sehingga aparat kepolisian harus melakukan tindakan tegas dalam pengamanan demo. Adapun pesan moral pada Tirto.id yakni demonstrasi merupakan bentuk pengungkapan aspirasi

khalayak yang harus didengarkan oleh penguasa dan menjadi salah satu sarana khalayak untuk menyuarakan pendapatnya ke pemerintah.

4. Selanjutnya solusi yang ditawarkan oleh media Liputan6.com adalah dengan menghimbau agar khalayak mengawal perkembangan isu UU Cipta Kerja dengan aksi yang humanis dan tidak anarkis, tidak termakan *hoaks* atau *fake news*, bijak memilah dan memahami informasi dan yang lebih utama adalah mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemberitaan Liputan6.com cenderung fokus pada kericuhan yang terjadi dan mengesampingkan pemberitaan mengenai apa yang menjadi tuntutan massa saat demonstrasi. Hal berbeda disampaikan Tirto.id dimana solusi yang ditawarkan adalah menyarankan transparansi, keterlibatan publik dan menyuarakan pencabutan *omnibus law* terutama pasal-pasal bermasalah.
5. Secara keseluruhan, pemberitaan Liputan6.com mengenai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja edisi 8–9 Oktober 2020 cenderung fokus pada kericuhan yang terjadi selama demonstrasi dan mengesampingkan pemberitaan mengenai apa yang menjadi tuntutan massa saat demonstrasi. Adapun Tirto.id berusaha untuk merepresentasikan realita mengenai unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dengan pemberitaan yang lebih objektif dan berimbang. Dimana pemberitaan mengenai kerusuhan yang terjadi juga tidak mengabaikan alasan utama demonstrasi dilakukan dan memuat kronologis yang lebih gamblang.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, media seperti Liputan6.com seharusnya dapat memberitakan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja secara lebih objektif serta berimbang agar tidak terjadi pengendalian opini publik oleh pihak tertentu dan kebingungan informasi di masyarakat luas. Bagaimanapun media memiliki tanggung jawab dalam melayani kepentingan publik dan menjaga integritas etika profesi para praktisi media. Selain itu teori, konsep dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana media melakukan pembingkaiian terhadap sebuah isu dan menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rekan-rekan jurnalis serta institusi media *online* dalam menyampaikan informasi kepada khalayak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terbatas pada analisis teks media saja, tanpa melihat faktor lain di dalam media yang dapat mempengaruhi agenda pemberitaan. Keterbatasan selanjutnya adalah pada kemampuan peneliti dalam menganalisis *framing* secara lebih luas yang hanya terbatas pada dua situs media *online* yaitu Tirto.id dan Liputan6.com. Peneliti berharap

penelitian seterusnya dapat dikembangkan lebih mendalam dengan menjabarkan keseluruhan komponen *framing* bukan hanya pada teks saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badara Aris. (2013). *Analisis Wacana: Teori, Metode dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cresswell, John. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fahmi, Ismail (2020, October 8). *Analisis NLP Berita Online Aksi Demo 8 Oktober 2020*. Diakses dari <https://pers.droneemprit.id/analisis-2/>
- Idhom, M. Addi. (2020, October 8). *Demo Hari Ini Tolak Omnibus Law: Kronologi, Daftar Lokasi, Penyebab*. Diakses dari <https://tirto.id/demo-hari-ini-tolak-omnibus-law-kronologi-daftar-lokasi-penyebab-f5Kj>
- Kartika D. Shanti. (2020). Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. *Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI*, 12(20), 2-3.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2005). *Jurnalistik, Teori dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mayasari Ima. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, *Jurnal Rechvinding*, 9(1), 1-2, doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>
- Nastitah Hayyitita dan Rachmaria Laksmi. (2020). Pembingkai Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Framing Robert M. Entman Pada Media Online Tribunnews.com Periode 23-24 September 2019). *Jurnal Dialektika Komunika*, 8(2), 1-2, doi: <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.681>
- Umari F. Gisella dan Purnama Hadi. (2020). Kasus Hoax Ambulans Pemprov Dki Dan Pmi Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Ambulans Pemprov DKI dan PMI Membawa Batu dan Bensin saat Aksi Demo 26 September 2019 di Kompas.com dan Detik.com). *eProceedings of Management Universitas Telkom*. 7(2), 1-2
- Widodo (1997), *Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar dan Majalah*. Surabaya: Indah.